

Penanaman Ideologi Pancasila pada Anak Usia Dini melalui Film Si Unyil: Analisis Hegemoni Orde Baru

Oktaviani^{1*}, Siti Fatimah²

^{1,2} Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*aniioktavi5@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the function of the children's television series "Si Unyil" (1981-1993) as an instrument of state hegemony during the New Order period in Indonesia. The New Order regime systematically utilized mass media as an ideological state apparatus to consolidate power and legitimize its rule. This research addresses two main questions: first, how the concept of "Pancasila society" was manifested and reflected in the series; second, how "Si Unyil" served as a medium for instilling Pancasila ideology in early childhood. Using the historical method encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography within Gramsci's hegemony theory, this research analyzes the series' narrative strategies, character construction, and value representations through selected episodes and archival documents. The findings reveal that "Si Unyil" operated as a subtle yet effective propaganda apparatus, employing naturalization and pleasurable learning to internalize Pancasila values. The series constructed an idealized Pancasila society characterized by obedience to authority, social harmony, and uniformity, projecting the state's vision of an orderly society that diverged significantly from the actual social realities of the New Order era, marked by economic inequality and political repression. This study contributes to understanding how authoritarian regimes utilize seemingly apolitical cultural forms children's entertainment to achieve political goals.

Keywords: *Hegemony, Si Unyil, New Order, Pancasila, Propaganda*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fungsi serial televisi anak-anak "Si Unyil" (1981-1993) sebagai instrumen hegemoni negara pada masa Orde Baru di Indonesia. Rezim Orde Baru secara sistematis memanfaatkan media massa sebagai aparatus ideologis negara untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan melegitimasi pemerintahannya. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana konsep "masyarakat Pancasila" diwujudkan dan direfleksikan dalam serial tersebut; kedua, bagaimana "Si Unyil" berfungsi sebagai media penanaman ideologi Pancasila pada anak usia dini. Dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, serta dianalisis dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, penelitian ini menganalisis strategi naratif, konstruksi karakter, dan representasi nilai dalam serial melalui episode-episode terpilih dan dokumen arsip. Temuan menunjukkan bahwa "Si Unyil" beroperasi sebagai aparatus propaganda yang halus namun efektif, menggunakan mekanisme naturalisasi dan pembelajaran yang menyenangkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Serial ini mengonstruksi masyarakat Pancasila yang ideal dengan karakteristik kepatuhan pada otoritas, harmoni sosial, dan keseragaman, yang merupakan proyeksi visi negara tentang masyarakat tertib yang sangat berbeda dari realitas sosial era Orde Baru yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi dan represi politik.

Kata Kunci: *Hegemoni, Si Unyil, Orde Baru, Pancasila, Propaganda.*

PENDAHULUAN

Era Orde Baru (1966-1998) merupakan periode transformatif dalam sejarah Indonesia modern yang ditandai oleh konsolidasi kekuasaan negara secara sentralistik dan penetrasi ideologis yang sistematis ke dalam kehidupan masyarakat. Pada masa ini, media massa mengalami pergeseran fungsi fundamental dari saluran informasi dan hiburan menjadi aparatus ideologis negara (*Ideological State Apparatus*) yang strategis (Althusser, 1971). Televisi Republik Indonesia (TVRI), sebagai satu-satunya stasiun televisi hingga akhir 1980-an, beroperasi di bawah monopoli dan kontrol ketat Departemen Penerangan dan berfungsi sebagai "corong resmi pemerintah" yang menyaring semua narasi publik (Sen & Hill, 2000). Dalam ekosistem media yang terkendali inilah, muncul serial animasi "Si Unyil" yang pertama kali ditayangkan pada 5 April 1981 dan diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) di bawah naungan Departemen Penerangan RI (Kitley, 2000). Serial ini secara lahiriah tampak sebagai hiburan anak-anak yang sederhana, namun di balik kemasan yang tampak apolitis tersebut tersembunyi kompleksitas ideologis yang mencerminkan proyek besar Orde Baru, yakni rekayasa sosial skala nasional untuk menyeragamkan kesadaran politik warga negara sejak usia dini.

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang Si Unyil masih terbatas pada aspek pendidikan karakter dan belum banyak yang mengaitkannya secara kritis dengan proyek hegemoni politik Orde Baru yang lebih luas. Daniel Nakula Putra (2021) dalam skripsinya yang berjudul "Peran Film Cerita Boneka Si Unyil Sebagai Media Informasi, Edukasi dan Penguatan Nilai Budaya Bangsa Tahun 1979-1993" mengkaji peran serial ini sebagai media informasi, edukasi, dan penguatan nilai budaya seperti nasionalisme dan kerja keras, namun kurang mengeksplorasi dimensi politis yang mendalam. Demikian pula, Ningrum dan Trilaksana (2014) dalam artikel jurnal mereka "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Film 'Si Unyil' Tahun 1979-1992" berfokus pada analisis nilai-nilai pendidikan karakter seperti tanggung jawab dan cinta tanah air, tanpa mengaitkannya dengan proyek hegemoni politik Orde Baru. Sementara itu, Hadi dan Kasuma (2012) dalam artikel "Propaganda Orde Baru 1966-1980" mengungkapkan bahwa pemerintah Orde Baru menggunakan media massa untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, namun penelitian tersebut membahas media konvensional untuk masyarakat umum, bukan media yang secara khusus ditujukan kepada anak-anak. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik tentang Film Si Unyil sebagai alat hegemoni Orde Baru dalam menanamkan Pancasila pada anak usia dini menggunakan pendekatan metode sejarah dan teori hegemoni Gramsci, yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan teori hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci (1971) sebagai kerangka analisis utama, yang mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan moral dan intelektual yang dilakukan melalui konsensus, bukan paksaan, di mana kelompok penguasa mempengaruhi cara pandang masyarakat sehingga menerima nilai-nilai yang dominan sebagai sesuatu yang wajar dan tak terbantahkan (*common sense*). Dalam kerangka ini, kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui instrumen koersif negara

(seperti polisi dan militer), tetapi juga melalui aparatus ideologis yang bekerja secara halus melalui pendidikan, media massa, dan kebudayaan. Konsep hegemoni Gramscian ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana Orde Baru menggunakan media massa, termasuk Si Unyil, sebagai instrumen untuk membangun konsensus publik terhadap nilai-nilai Pancasila versi negara. Pada masa Orde Baru, Pancasila memiliki level kekuatan legitimasi paling tinggi dan ditafsirkan secara tunggal oleh negara melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dilembagakan melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 dan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 (Lahur, 1981).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana negara menggunakan media budaya populer, khususnya film anak-anak, sebagai instrumen hegemoni ideologis yang membentuk kesadaran generasi muda sejak usia dini. Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ideologis karena berada dalam tahap perkembangan kognitif yang belum memiliki perangkat kritis untuk memfilter pesan-pesan yang disisipkan dalam tontonan mereka. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Film Si Unyil dijadikan sebagai alat hegemoni Orde Baru untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini melalui dua lapisan analisis: pertama, bagaimana konsep "masyarakat Pancasila" versi Orde Baru diwujudkan dan direfleksikan dalam serial Si Unyil melalui strategi naratif, konstruksi karakter, dan representasi nilai-nilai; kedua, bagaimana Si Unyil berfungsi sebagai medium penanaman ideologi Pancasila kepada anak usia dini melalui mekanisme naturalisasi dan *pleasurable learning*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian sejarah budaya dan sejarah pendidikan di Indonesia, serta kontribusi praktis berupa pemahaman kritis tentang relasi kuasa antara negara, media, dan pembentukan ideologi pada masa Orde Baru yang dapat dijadikan sebagai studi kasus konkret dalam pengajaran sejarah Indonesia kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*) dengan pendekatan kualitatif. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985). Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang mengkaji peristiwa masa lalu, yaitu produksi dan penayangan Film Si Unyil pada masa Orde Baru (1981-1993), serta menganalisis makna ideologis di balik teks budaya tersebut. Dalam penerapannya, metode sejarah terdiri atas empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Sjamsuddin, 2012). Untuk mempertajam analisis terhadap konten visual dan naratif film, penelitian ini juga mengintegrasikan metode analisis konten (*content analysis*) dan analisis simbolik, serta menggunakan konsep indikator sebagai instrumen identifikasi pesan ideologis yang disusun berdasarkan lima sila Pancasila.

Tahap pertama, heuristik atau pengumpulan sumber, dilakukan melalui pengumpulan sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer meliputi episode-episode terpilih dari serial Si Unyil yang ditayangkan di TVRI pada periode 1981-1992,

khususnya episode "Hikmah Menabung", "Sedikit-Sedikit Menjadi Bukit", serta "Si Tinah Mengungsi" yang dikumpulkan dan ditranskripsikan. Selain itu, sumber primer juga mencakup dokumen resmi seperti naskah skenario dan *storyboard* dari arsip Pusat Produksi Film Negara (PPFN) di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dokumen kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Penerangan RI tahun 1979, serta arsip kebijakan Orde Baru terkait penyiaran TVRI dan penataran P4. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Arsiparis Ari Syah Bungsu dari Pusdipres pada 22 April 2025. Sumber sekunder meliputi buku-buku tentang politik media Orde Baru karya Philip Kitley, Krishna Sen dan David T. Hill, serta David Bouchier; artikel jurnal akademik terkait propaganda, hegemoni, dan televisi anak-anak; serta penelitian terdahulu tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam Film Si Unyil.

Tahap kedua, kritik sumber, dilakukan melalui kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji keaslian material sumber, seperti memverifikasi keaslian dokumen kerjasama Dinas P&K dengan Departemen Penerangan RI tahun 1979 melalui cap resmi PPFN, memeriksa metadata episode Si Unyil, serta mengecek kredibilitas narasumber wawancara. Kritik internal bertujuan untuk menguji validitas dan kredibilitas isi informasi, termasuk menganalisis bias atau kepentingan dalam konten Si Unyil dengan mengidentifikasi simbol-simbol Pancasila yang direpresentasikan secara visual maupun naratif, seperti representasi lima sila, simbol-simbol kenegaraan (bendera Merah Putih, lambang Garuda Pancasila), serta simbol-simbol sosial Orde Baru (program Keluarga Berencana, Tabanas, semangat gotong royong). Hasil wawancara juga dibandingkan dengan dokumen resmi untuk memastikan konsistensi informasi dan menghindari subjektivitas narasumber.

Tahap ketiga, interpretasi, dilakukan dengan memilah dan menggabungkan data yang telah diverifikasi untuk membangun narasi yang koheren, menghubungkan konten Film Si Unyil dengan kebijakan Orde Baru menggunakan konsep indikator berdasarkan lima sila Pancasila, serta pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough (1995) untuk mengurai pesan ideologis tersembunyi dalam film. Seluruh temuan dianalisis dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, di mana Si Unyil dipahami sebagai aparatus hegemoni yang membangun persetujuan secara halus dengan menormalisasi nilai-nilai negara sebagai kewajiban sosial. Tahap keempat, historiografi atau penulisan sejarah, dilakukan dengan menyusun hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan fakta-fakta sejarah secara sistematis kemudian menganalisisnya dengan kerangka teori yang telah ditentukan. Penulisan dimulai dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi analisis mendalam tentang Si Unyil sebagai alat propaganda yang disusun berdasarkan lima indikator sila Pancasila sebagai kerangka tematik, dan diakhiri dengan kesimpulan. Argumen dalam penulisan didukung oleh bukti-bukti yang telah diverifikasi, seperti kutipan adegan, deskripsi simbol visual, dokumen kebijakan, atau kutipan hasil wawancara. Peneliti juga memberikan refleksi kritis tentang dampak propaganda melalui media anak-anak dan relevansinya dengan konteks media kontemporer.

PEMBAHASAN

Hegemoni Orde Baru dan Ideologi Pancasila

Era Orde Baru (1966-1998) ditandai oleh upaya sistematis negara dalam membangun hegemoni ideologis melalui penguasaan atas wacana publik. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membangun arena wacana yang didominasi oleh istilah-istilah kunci seperti "Pembangunan Nasional", "Stabilitas Nasional", dan "Pancasila" untuk menciptakan legitimasi dan persetujuan publik (Sen & Hill, 2000). Istilah-istilah ini tidak sekadar menjadi slogan politik, melainkan direkayasa menjadi *common sense* serangkaian keyakinan yang diterima begitu saja sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah oleh masyarakat. Melalui dominasi wacana ini, negara berhasil mengkondisikan publik untuk menerima narasi bahwa pembangunan ekonomi dan stabilitas politik adalah prioritas mutlak yang tidak boleh diganggu gugat, dan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang sah bagi bangsa Indonesia. Strategi hegemoni melalui bahasa ini menjadi instrumen yang sangat efektif karena ia bekerja bukan melalui paksaan fisik, melainkan melalui pembentukan kesadaran dan penerimaan sukarela terhadap nilai-nilai yang dikehendaki oleh penguasa (Gramsci, 1971). Kebijakan asas tunggal Pancasila merupakan puncak dari upaya hegemoni ideologis Orde Baru, yang dilembagakan melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) serta Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 tentang pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) (Lahur, 1981). Penataran P4 dilaksanakan secara masif dan hierarkis di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pegawai negeri sipil yang wajib mengikutinya sebagai prasyarat kenaikan pangkat, mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi, hingga masyarakat pedesaan melalui program PKK (Aurora, 2024).

Dalam proyek hegemoni ini, Televisi Republik Indonesia (TVRI) memainkan peran yang sangat sentral. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Penerangan No. 34/1966 tentang Fungsi TVRI, televisi difungsikan sebagai alat penanaman ideologi Pancasila dan sarana pembangunan nasional. TVRI beroperasi di bawah monopoli dan kontrol ketat Departemen Penerangan hingga akhir 1980-an, yang berfungsi sebagai "corong resmi pemerintah" yang menyaring semua narasi publik dan memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila versi negara (Sen & Hill, 2000). Kontrol ini tidak hanya bersifat represif melalui sensor, tetapi juga produktif dengan mendorong terciptanya konten yang aktif mempromosikan ideologi negara. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber Ari Syah Bungsu, seorang arsiparis di Pusdipres, pada masa Orde Baru terdapat lembaga-lembaga yang bertugas menyampaikan informasi kegiatan, himbauan, ataupun capaian kinerja pemerintah, yakni Kementerian Penerangan, TVRI, RRI, dan Pusat Produksi Film Negara (PPFN), yang menjadi "corong pemerintah" atau "Media Pemerintah" (wawancara, 22 April 2025). Hingga tahun 1989, TVRI menjadi satu-satunya media hiburan audio visual yang ada dan menarik bagi masyarakat Indonesia, sehingga program-program yang ditayangkan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat (wawancara Ari Syah Bungsu, 22 April 2025). Keputusan Menteri Penerangan No. 115/KEP/MENPEN/1979

tentang Dewan Film Nasional semakin menegaskan peran film sebagai alat "pembinaan bangsa" yang wajib menyampaikan nilai-nilai negara (Kitley, 2000). Dengan demikian, TVRI tidak berfungsi sebagai ruang publik yang independen, melainkan sebagai aparatus ideologis negara yang secara aktif memproduksi dan mereproduksi wacana dominan tentang Pancasila dan pembangunan nasional.

Di dalam ekosistem media yang terkendali ketat inilah, muncul serial animasi "Si Unyil" sebagai fenomena budaya populer yang unik dan representatif. Film Si Unyil lahir pada tahun 1981 sebagai buah dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang menjadikan media massa sebagai alat pembangunan nasional sekaligus instrumen penanaman ideologi (Kitley, 2000). Serial boneka yang diciptakan oleh Suyadi ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Nasional (PPFN) di bawah naungan Departemen Penerangan RI, dan tayang perdana di TVRI pada 5 April 1981. Keterlibatan pemerintah dalam produksi film ini sangat kuat, sebagaimana dibuktikan dengan adanya dokumen kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Penerangan RI pada tahun 1979, yang secara khusus mengatur tentang produksi dan distribusi film boneka sebagai media penerangan dan pendidikan bagi anak-anak (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1979). Dokumen kerjasama tersebut menunjukkan bahwa negara telah merencanakan sejak awal penggunaan film boneka sebagai instrumen pendidikan dan penerangan bagi anak-anak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Gufran Dwipayana, Direktur PPFN sekaligus Asisten Menteri bidang Media Massa/Dokumentasi Sekretariat Negara, yang mengakui bahwa di setiap kisah Si Unyil disisipkan pesan-pesan pemerintah sehingga serial ini berfungsi sebagai "semacam pelajaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) buat anak-anak" (Tempo, 31 Oktober 1981).

Pendanaan serial ini diambil dari tiga sumber anggaran PPFN, TVRI, dan dana yang dihimpun PPFN dari departemen pemerintah seperti Departemen Kesehatan, Departemen Kependudukan dan Lingkungan, serta ABRI (Kitley, 2014). Konsekuensi dari intervensi ini adalah hilangnya kebebasan kreatif para pembuat Si Unyil. Suyadi selaku pencipta karakter dan pengisi suara Pak Raden, serta Kurnain selaku penulis cerita, diketahui menyayangkan masuknya cerita-cerita berat ke dalam Si Unyil karena mereka merasa kebebasan kreatif mereka dibatasi oleh departemen pemerintah yang mensponsori episode-episode tertentu (Kitley, 2014; Alinea.id, 2023). Menurut Kitley (2014), Kurnain mengeluh karena departemen pemerintah membatasi kebebasannya untuk menulis dengan cara yang menarik bagi anak-anak, sementara Suyadi mengatakan bahwa hal itu menjadi cobaan setelah TVRI mengetahui Si Unyil ditonton oleh keluarga, bukan hanya anak-anak, sehingga mendorong departemen pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya untuk mencari akses ke program tersebut sebagai cara untuk memperluas informasi tentang peran dan program mereka kepada orang dewasa maupun anak-anak.

Kritik terhadap pemaksaan pesan ini semakin menguat seiring dengan menurunnya kualitas dan popularitas Si Unyil. Marselli Sumarno mencatat bahwa masa keemasan Si Unyil hanya bertahan sekitar dua tahun, dan di tahun keempat mulai muncul kejenuhan pemirsa karena produknya "membelok karena beban pesan-pesannya" (Kompas, 31 Maret

1985). Ia mencontohkan bagaimana Unyil sering kali diposisikan secara tidak wajar untuk menjelaskan persoalan berat masalah orang dewasa sehingga terkesan "memaksakan diri jadi dewasa" dan kehilangan kewajaran sebagai tokoh anak-anak. Akhirnya, pada 21 November 1993, boneka-boneka Si Unyil hanya tersimpan di rak studio PPFN, dan Kitley (2014) menyimpulkan bahwa program tersebut telah "kehilangan arah" karena terlalu condong ke arah pemodelan subjek anak ideal sebagai bagian dari pembangunan nasional dan jauh dari hiburan anak-anak. Dengan demikian, kegagalan Si Unyil mempertahankan popularitasnya justru menjadi bukti bahwa pendekatan hegemoni yang terlalu kaku dan sarat pesan ideologis pada akhirnya kontraproduktif, karena menghilangkan daya tarik utamanya sebagai hiburan anak-anak yang segar dan orisinal.

Analisis Hegemoni: Representasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Film Si Unyil

Analisis hegemoni Gramscian memberikan kerangka yang tepat untuk memahami bagaimana Film Si Unyil berfungsi sebagai alat penanaman ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Film Si Unyil, dengan pendekatan yang lembut dan menghibur melalui boneka dan cerita, menjadi contoh sempurna dari aparatus hegemoni ini. Negara menanamkan nilai-nilai Pancasila tanpa terkesan memaksa (konsensus), sehingga anak-anak menerima nilai tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah (*common sense*). Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber, Si Unyil merupakan bentuk upaya pemerintah untuk membentuk karakter anak Indonesia, mendidik, hingga menyampaikan program-program pemerintah dengan metode yang menarik, dan nilai-nilai Pancasila disampaikan secara afektif melalui lakon cerita yang dikemas menarik bagi anak-anak (wawancara Ari Syah Bungsu, 22 April 2025). Film anak-anak dipilih sebagai media yang efektif karena menjangkau anak usia dini, yang sedang dalam masa pembentukan karakter dan kesadaran ideologis. Film Si Unyil ditargetkan untuk anak-anak usia sekolah dasar, sekitar 6 hingga 12 tahun, yang berada dalam tahap perkembangan kognitif yang sangat reseptif terhadap nilai-nilai dan norma yang diajarkan melalui tokoh idola dan cerita yang menarik (Santrock, 2011). Karakteristik ini dimanfaatkan secara optimal oleh Si Unyil untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, karena anak-anak tidak menyadari bahwa mereka sedang "diajari" ketika mereka menikmati petualangan Unyil dan teman-temannya di desa yang harmonis.

Untuk mengurai pesan ideologis tersembunyi dalam Film Si Unyil secara lebih sistematis, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (1995). Fairclough mengoperasikan analisis wacana pada tiga dimensi yang saling terkait: dimensi teks (mikro), dimensi praktik diskursif (meso), dan dimensi praktik sosial (makro). Pada dimensi teks, penelitian ini mengkaji pilihan diksi, struktur kalimat, dan simbol-simbol visual dalam episode-episode Si Unyil yang merepresentasikan nilai-nilai Pancasila, seperti sapaan religius "Assalamualaikum", dialog normatif tentang menabung di bank, serta simbol-simbol visual seperti peci, sarung, dan warna pakaian tokoh yang sengaja dipilih agar tidak terkesan condong pada salah satu partai politik yang sedang berseteru pada masa itu (Suyadi, wawancara dengan TV One, 2013). Pada dimensi praktik diskursif, penelitian ini

menganalisis bagaimana produksi dan distribusi Si Unyil melibatkan intervensi aparatus negara mulai dari dokumen kerjasama Dinas P&K dengan Departemen Penerangan RI tahun 1979 yang secara khusus mengatur produksi film boneka sebagai media penerangan dan pendidikan bagi anak-anak (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1979), hingga pendanaan dari departemen pemerintah dan ABRI yang mensponsori episode-episode tertentu dengan muatan pesan yang sesuai dengan agenda mereka (Kitley, 2014). Pada dimensi praktik sosial, penelitian ini mengaitkan wacana yang diproduksi oleh Si Unyil dengan struktur sosial dan politik yang lebih luas, yaitu bagaimana Orde Baru membangun hegemoni ideologis melalui penguasaan atas wacana publik dan penafsiran tunggal terhadap Pancasila melalui program P4 (Lahur, 1981). Dengan demikian, Si Unyil tidak sekadar menghibur, tetapi secara aktif memproduksi dan mereproduksi wacana dominan tentang "masyarakat Pancasila" yang patuh, harmonis, dan seragam sebuah konstruksi yang secara kontras bertolak belakang dengan realitas sosial Orde Baru yang sebenarnya. Pendekatan Fairclough ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam teks film, tetapi juga mengungkap bagaimana nilai-nilai tersebut diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam konteks kekuasaan Orde Baru yang otoriter.

Si Unyil berperan sebagai versi "P4 untuk anak-anak", di mana nilai-nilai Pancasila yang abstrak dan terkadang sulit dipahami oleh anak-anak diterjemahkan ke dalam cerita-cerita sederhana yang mudah dicerna dan menyenangkan untuk ditonton (Kitley, 2000). Hal ini sejalan dengan konsep *pleasurable learning* yang dikemukakan oleh Kitley, di mana anak-anak menyerap pesan-pesan negara sambil menikmati hiburan, sehingga proses penanaman ideologi berlangsung tanpa perlawanan atau kritik dari audiens yang paling rentan. Berikut adalah analisis representasi nilai-nilai Pancasila dalam episode-episode terpilih Si Unyil:

Representasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Representasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Film Si Unyil tampak secara halus melalui berbagai elemen naratif dan visual. Meskipun tidak tampak secara dominan dalam tiga episode yang menjadi fokus penelitian, nilai ketuhanan hadir melalui sapaan "Assalamualaikum" yang digunakan oleh tokoh Unyil saat berinteraksi dengan warga desa dalam episode "Si Tinah Mengungsi". Hal ini mencerminkan nilai religiusitas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ningrum dan Trilaksana (2014) yang menunjukkan bahwa Pak Raden dan Bu Raden ditampilkan sebagai tokoh yang religius dalam serial Si Unyil. Pada dimensi teks Fairclough, penggunaan sapaan "Assalamualaikum" bukan sekadar sapaan biasa, melainkan pilihan diksi yang secara sadar dikonstruksi untuk menormalisasi praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus merepresentasikan nilai toleransi antarumat beragama yang menjadi ciri masyarakat Pancasila. Pada dimensi praktik diskursif, penggambaran tokoh-tokoh yang religius ini diproduksi dalam konteks kebijakan Orde Baru yang mewajibkan seluruh warga negara untuk berketuhanan sesuai dengan sila

pertama Pancasila. Meskipun representasi sila pertama ini tidak terlalu eksplisit, kehadirannya dalam elemen-elemen kecil seperti sapaan dan karakter tokoh dewasa yang religius menunjukkan bahwa negara ingin menanamkan nilai ketuhanan sebagai bagian dari identitas sehari-hari anak-anak, bukan sebagai doktrin yang bersifat seremonial. Hal ini penting karena anak-anak pada usia dini lebih mudah menyerap nilai-nilai melalui contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari daripada melalui ajaran-ajaran abstrak.

Representasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tampak paling kuat dalam episode "Si Tinah Mengungsi", yang menyajikan narasi solidaritas sosial yang mengharukan. Dalam episode ini, Unyil bersama sahabat-sahabatnya berinisiatif mengumpulkan bantuan untuk keluarga Tinah yang terkena banjir. Adegan penyerahan bantuan, ketika Unyil berkata "Sudahlah jangan menangis, kami membawa beras dan lauk-pauknya untuk kalian," menunjukkan bahwa aksi spontan para tokoh anak merefleksikan nilai empati, kepedulian terhadap sesama, dan sikap tolong-menolong tanpa pamrih. Adegan ini secara halus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak-anak penonton, bahwa membantu sesama yang sedang kesusahan adalah kewajiban moral yang harus dilakukan. Melalui narasi yang emosional dan mengharukan, anak-anak diajak untuk mengidentifikasi diri dengan tokoh Unyil dan merasakan empati terhadap penderitaan Tinah, sehingga nilai-nilai kemanusiaan terinternalisasi bukan melalui doktrinasi langsung, melainkan melalui pengalaman emosional yang menyentuh. Nilai tolong-menolong dan kepedulian sosial yang ditampilkan dalam episode ini juga sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi instrumen untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang diidealkan oleh negara Orde Baru. Pada dimensi praktik sosial Fairclough, narasi solidaritas dalam episode ini berfungsi untuk mengonstruksi citra masyarakat yang harmonis dan saling peduli sebuah citra yang secara kontras bertolak belakang dengan realitas sosial Orde Baru yang ditandai oleh kesenjangan ekonomi dan represi politik.

Representasi Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia terlihat dari upaya serial ini untuk menghadirkan keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai kesatuan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Kitley (2000), Si Unyil berupaya menciptakan komunitas nasional yang homogen dan bersatu di bawah negara. Keberagaman tersebut ditampilkan secara eksplisit melalui kehadiran tokoh Ucrit yang beragama Kristen, serta tokoh Meilani yang merupakan anak keturunan Tionghoa, yang mencerminkan tema "Bhinneka Tunggal Ika". Pada dimensi teks Fairclough, simbol-simbol visual seperti mata sipit serta rambut kepeng dua Meilani adalah pilihan representasi yang disengaja untuk menonjolkan identitas etnis. Penggambaran keberagaman ini berfungsi untuk menanamkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa kepada anak-anak, bahwa meskipun berbeda-beda agama dan suku, mereka tetap merupakan bagian dari satu bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita Orde Baru

untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan terintegrasi, di mana perbedaan-perbedaan yang ada tidak dipermasalahkan selama semua pihak tunduk pada ideologi negara (Bourchier, 2019). Namun demikian, penggambaran keberagaman dalam Si Unyil cenderung bersifat dangkal dan dekoratif, karena perbedaan-perbedaan tersebut tidak pernah menjadi sumber konflik atau diskusi yang bermakna dalam cerita. Dengan kata lain, keberagaman ditampilkan sebagai fakta yang sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan sebuah pendekatan yang pada dimensi praktik sosial mencerminkan kebijakan Orde Baru terhadap isu-isu perbedaan yang cenderung represif dan mengedepankan keseragaman di atas kebhinnekaan.

Representasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tampak jelas dalam episode "Hikmah Menabung", yang menampilkan pelibatan aktif aparat birokrasi desa dalam menyelesaikan masalah kriminalitas. Ketika Unyil dan Usro dikejar oleh penjahat, mereka melapor kepada Pak Lurah dan Hansip, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan melalui jalur birokrasi yang benar. Adegan ini secara implisit mengajarkan anak-anak bahwa negara (dalam hal ini aparat desa) adalah pelindung dan penengah yang harus dihormati dan dipatuhi. Pada dimensi teks Fairclough, pilihan kata dan struktur narasi yang menggambarkan aparat negara sebagai sosok yang bijaksana dan melindungi adalah konstruksi wacana yang sengaja dibangun untuk menormalisasi kepatuhan pada otoritas negara. Nilai musyawarah juga tampak dalam berbagai episode di mana masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan diskusi bersama, yang merupakan representasi dari demokrasi ala Orde Baru yang lebih mengedepankan konsensus daripada perdebatan terbuka. Pada dimensi praktik diskursif, produksi narasi kepatuhan pada aparat negara ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah yang mensponsori episode-episode tertentu dengan muatan pesan yang mendukung legitimasi birokrasi negara.

Namun demikian, representasi ini juga menuai kritik. Menurut Marselli Sumarno, Unyil sering kali ditempatkan pada posisi serba dewasa untuk menjelaskan persoalan berat yang seharusnya menjadi ranah orang dewasa. Dalam episode tentang pemilihan kepala desa, misalnya, Unyil berkata kepada teman-temannya, "Kita enggak usah ikut-ikutan memilih. Kita kan masih kecil." Namun, ucapan ini terasa dipaksakan dan tidak wajar keluar dari benak seorang anak, apalagi ketika Unyil dalam episode "Si Unyil dalam Raja Diraja" (tayang 11 dan 18 Oktober 1981) harus menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia kepada seorang raja—sebuah adegan yang dikritik oleh pembaca *Kompas* karena dikhawatirkan membuat anak-anak "matang sebelum masak" (Tempo, 31 Oktober 1981). Kritik senada juga disampaikan oleh Arswendo Atmowiloto (1986) yang menyayangkan Unyil harus terlibat dalam masalah "pembangunan" dan pemilu. Pada dimensi praktik sosial, kritik-kritik ini menunjukkan bahwa meskipun hegemoni bekerja secara halus melalui media, ia tetap dapat dikenali dan ditolak oleh sebagian masyarakat yang menilai bahwa pemaksaan

pesan ideologis telah melampaui batas kewajaran sebuah tayangan anak-anak.

Representasi Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan yang paling dominan dalam Si Unyil, terutama melalui pengenalan program Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional) dalam dua episode sekaligus, yakni "Hikmah Menabung" dan "Sedikit-Sedikit Menjadi Bukit". Program Tabanas merupakan program pemerintah Orde Baru yang secara sengaja digunakan sebagai alat penggerakan modal pembangunan dari masyarakat, dan Si Unyil berfungsi sebagai corong untuk mengenalkan program ini kepada anak-anak sejak usia dini (Robison, 1986). Pada dimensi teks Fairclough, proses menabung di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa digambarkan sebagai aktivitas yang terpuji dan aman, dengan dialog petugas bank yang melayani warga desa dengan ramah, sementara Pak Lurah secara eksplisit menyarankan agar warga segera menyetorkan uang mereka ke bank daripada menyimpannya di rumah. Pilihan diksi seperti "terpuji", "aman", dan "bijaksana" yang melekat pada aktivitas menabung di bank adalah strategi wacana untuk membangun citra positif program pemerintah. Pada dimensi praktik diskursif, produksi episode ini melibatkan intervensi langsung Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai sponsor, yang mendorong PPFN untuk menciptakan narasi yang mempromosikan program Tabanas. Analisis kritis terhadap adegan-adegan ini menunjukkan bahwa pengenalan Tabanas dibingkai sebagai solusi preventif terhadap kriminalitas, yang secara halus menanamkan doktrin bahwa institusi formal negara adalah satu-satunya tempat yang aman untuk menyimpan uang, sementara menyimpan uang di rumah dianggap sebagai tindakan yang berisiko dan tidak bertanggung jawab.

Selain itu, dalam episode "Sedikit-Sedikit Menjadi Bukit", digambarkan bagaimana Usro yang rajin menabung akhirnya dapat membeli sepeda baru, sementara tokoh lain yang tidak menabung mengalami kesulitan. Narasi ini secara implisit mengajarkan bahwa menabung adalah kunci kesuksesan dan kemakmuran, sekaligus mempromosikan program pemerintah sebagai jalan menuju kesejahteraan. Pada dimensi praktik sosial, wacana tentang menabung di bank ini mereproduksi ideologi pembangunan Orde Baru yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi sumber daya masyarakat untuk kepentingan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan Orde Baru yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi sumber daya masyarakat untuk kepentingan pembangunan nasional. Dengan demikian, representasi Sila Keadilan Sosial dalam Si Unyil tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan karakter, tetapi juga sebagai instrumen mobilisasi ekonomi yang mendukung agenda pembangunan negara.

Tabel 1. Representasi Nilai-Nilai Pancasila dalam beberapa Episode Film Si Unyil

Sila Pancasila	Manifestasi dalam Episode	Contoh Adegan/Dialog	Fungsi Hegemoni
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	Sapaan religius, tokoh religius	Sapaan "Assalamualaikum" Unyil di episode "Si Tinah Mengungsi"; tokoh Pak Raden dan Bu Raden yang religious	Menormalisasi nilai religiusitas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Solidaritas sosial, tolong-menolong	Unyil mengumpulkan bantuan untuk Tinah yang terkena banjir; dialog "Sudahlah jangan menangis, kami membawa beras"	Menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial melalui pengalaman emosional
Sila Persatuan Indonesia	Keberagaman dalam bingkai kesatuan	Kehadiran tokoh Ucrit (Kristen) dan Meilani (Tionghoa)	Menanamkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas perbedaan
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Kepatuhan pada aparat negara, musyawarah	Unyil melapor kepada Pak Lurah dan Hansip setelah dikejar penjahat	Mengajarkan bahwa negara adalah pelindung dan penengah yang harus dihormati
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Program Tabanas, menabung di bank	Adegan menabung di BRI; dialog Pak Lurah tentang bahaya menyimpan uang di rumah	Mempromosikan program pemerintah sebagai jalan menuju kesejahteraan

Konstruksi Masyarakat Pancasila: Proyeksi Ideal vs Realitas Sosial

Film *Si Unyil* tidak hanya menanamkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mengonstruksi konsep masyarakat Pancasila sebagai warga negara ideal yang memiliki tiga karakteristik utama: patuh, harmonis, dan seragam. Pada dimensi teks Fairclough, ketiga karakteristik ini dikonstruksi melalui pilihan-pilihan naratif dan visual yang konsisten di seluruh episode. Masyarakat yang patuh tercermin dari kepatuhan tokoh-tokoh terhadap orang tua, guru, aparat negara, dan program pemerintah. Tidak pernah ada adegan pembangkangan terhadap otoritas dan setiap masalah selalu diselesaikan dengan mengikuti jalur birokrasi yang benar. Dalam episode "*Sedikit-Sedikit Menjadi Bukit*", Unyil menerima hukuman ayahnya tanpa protes dan menjalankan tugas produktif dengan disiplin, sebuah sikap yang mengajarkan anak-anak bahwa kepatuhan pada orang tua adalah nilai yang harus dijunjung tinggi. Anjuran "*bu guru*" untuk menabung di Tabanas diikuti oleh Unyil dan Usro tanpa pertanyaan atau keraguan, yang menunjukkan bahwa institusi pendidikan memiliki otoritas penuh untuk menentukan apa yang baik dan benar bagi murid-muridnya. Pada dimensi praktik diskursif, produksi narasi kepatuhan ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah yang secara aktif mendorong terciptanya konten yang mempromosikan kepatuhan pada otoritas negara sebagai nilai luhur.

Masyarakat yang harmonis tercermin dari tidak adanya konflik berkepanjangan dalam cerita, di mana semua masalah selalu diselesaikan secara damai dan kekeluargaan melalui musyawarah dan gotong royong, serta hubungan antartokoh yang selalu akrab dan saling menghargai tanpa ada permusuhan atau pertentangan yang berarti. Dalam episode "*Si Tinah Mengungsi*", Unyil, Usro, dan Ucrit dengan sukarela membantu Tinah yang sedang kesusahan tanpa pamrih, menunjukkan bahwa solidaritas sosial adalah nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Pancasila. Masyarakat yang seragam tercermin dari karakterisasi tokoh yang cenderung homogen, di mana semua anak digambarkan baik, rajin, sopan, patuh, dan memiliki tujuan yang sama, tanpa ada tokoh yang benar-benar "*berbeda*" atau "*menyimpang*" dari norma yang ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kitley (2000), *Si Unyil* berupaya menciptakan citra ideal anak-anak Indonesia yang ingin mengabdikan dan menunjukkan kesetiaan kepada negara, dengan mengkonstruksi karakter ideal dalam komunitas homogen dan menyajikan komunitas sebagai sebuah keluarga yang kewajibannya adalah membangun negara. Keseragaman ini bukanlah kebetulan, melainkan mencerminkan cita-cita Orde Baru untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan dapat dikendalikan, di mana keseragaman dipandang sebagai kunci stabilitas nasional dan integrasi bangsa. Pada dimensi praktik sosial Fairclough, konstruksi masyarakat Pancasila yang patuh, harmonis, dan seragam ini adalah proyeksi keinginan negara akan masyarakat yang tertib dan terkendali—sebuah wacana yang berfungsi untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan represif Orde Baru dengan menyajikan citra masyarakat yang ideal dan harmonis.

Namun demikian, gambaran masyarakat Pancasila dalam *Si Unyil* ini adalah proyeksi ideal dari negara, bukan potret realitas sosial masa Orde Baru yang sebenarnya. Realitas sosial Orde Baru ditandai oleh ketimpangan ekonomi yang tajam antara pusat dan daerah, represi politik terhadap oposisi dan perbedaan pendapat, serta kesenjangan sosial

yang semakin melebar seiring dengan kebijakan pembangunan yang lebih menguntungkan kelompok elit dan konglomerat (Schwarz, 1994). Si Unyil, dengan segala keindahan dan keharmonisannya, lebih merupakan "masyarakat buatan" yang dibangun oleh negara untuk menanamkan nostalgia dan kepatuhan pada generasi yang dibesarkan oleh tayangan tersebut (Kitley, 2000). Pada dimensi praktik sosial Fairclough, kontras antara citra ideal dalam Si Unyil dan realitas sosial Orde Baru menunjukkan bahwa film ini berfungsi sebagai instrumen hegemoni yang bekerja untuk menutupi dan menaturalisasi ketimpangan dan represi yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, Si Unyil tidak dapat dibaca sebagai dokumentasi realistis tentang masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru, melainkan sebagai proyeksi keinginan negara akan masyarakat yang tertib, stabil, dan terkendali sebuah cermin yang menunjukkan apa yang diinginkan oleh rezim, bukan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.

Penggunaan Si Unyil sebagai alat hegemoni ideologis tidak terlepas dari berbagai kritik yang muncul pada masanya. Kritik-kritik ini menunjukkan bahwa meskipun hegemoni bekerja secara halus, ia tetap dapat dikenali dan ditolak oleh sebagian masyarakat. Kritik pertama datang dari Marselli Sumarno yang mencatat bahwa masa keemasan Si Unyil hanya bertahan sekitar dua tahun, dan di tahun keempat mulai muncul kejenuhan pemirsa karena produknya "membelok karena beban pesan-pesannya" (Kompas, 31 Maret 1985). Ia mencontohkan bagaimana Unyil sering kali diposisikan secara tidak wajar untuk menjelaskan persoalan berat masalah orang dewasa sehingga terkesan "memaksakan diri jadi dewasa" dan kehilangan kewajaran sebagai tokoh anak-anak. Menurut Marselli, Si Unyil dapat bertahan lama di televisi bukan semata-mata karena kekayaan kisah anak-anak Indonesia, tetapi karena "pemaksaan dengan menyiasati kepopulerannya" (Kompas, 31 Maret 1985). Kritik kedua datang dari para pembuat Si Unyil sendiri, di mana Suyadi dan Kurnain menyayangkan masuknya cerita-cerita berat karena kebebasan kreatif mereka dibatasi oleh departemen pemerintah yang mensponsori episode-episode tertentu (Kitley, 2014). Kritik ketiga datang dari pengakuan terbuka pejabat negara sendiri, di mana Gufran Dwipayana secara terbuka mengakui bahwa Si Unyil berfungsi sebagai "semacam pelajaran P4 buat anak-anak" (Tempo, 31 Oktober 1981).

Dengan demikian, Si Unyil tidak dapat dibaca sebagai dokumentasi realistis tentang masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru, melainkan sebagai proyeksi keinginan negara akan masyarakat yang tertib, stabil, dan terkendali sebuah cermin yang menunjukkan apa yang diinginkan oleh rezim, bukan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Melalui analisis hegemoni ini, terbukti bahwa Si Unyil berfungsi sebagai alat propaganda yang halus namun efektif dalam menanamkan ideologi Pancasila dan konsep masyarakat Pancasila kepada anak-anak, yang merupakan bagian integral dari proyek politik Orde Baru untuk membentuk generasi penerus yang patuh, loyal, dan mendukung kelangsungan kekuasaan rezim. Kegagalan Si Unyil mempertahankan popularitasnya hingga akhir 1990-an justru menjadi bukti bahwa pendekatan hegemoni yang terlalu kaku dan sarat pesan ideologis pada akhirnya kontraproduktif, karena menghilangkan daya tarik utamanya sebagai hiburan anak-anak yang segar dan orisinal. Hal ini mengajarkan pelajaran berharga bahwa

efektivitas hegemoni melalui media budaya populer sangat bergantung pada keseimbangan antara muatan ideologis dan nilai hiburan, di mana dominasi pesan politik yang berlebihan justru dapat merusak daya tarik budaya populer itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Film Si Unyil pada masa Orde Baru (1981-1993) bukan sekadar tayangan hiburan anak-anak, melainkan instrumen hegemoni negara yang berfungsi secara halus namun efektif dalam menanamkan ideologi Pancasila kepada anak usia dini. Melalui pendekatan yang lembut dan menghibur, negara berhasil menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila tanpa terkesan memaksa, sehingga anak-anak menerima nilai tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah. Serial ini merepresentasikan kelima sila Pancasila dengan Sila Keadilan Sosial sebagai yang paling dominan melalui pengenalan program Tabanas, diikuti oleh Sila Kemanusiaan dan Persatuan melalui narasi gotong royong dan toleransi antaragama, serta Sila Kerakyatan dan Ketuhanan yang disampaikan secara lebih halus. Si Unyil juga mengonstruksi konsep masyarakat Pancasila sebagai warga negara ideal dengan tiga karakteristik utama patuh, harmonis, dan seragam yang mencerminkan cita-cita Orde Baru untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan terkendali. Namun demikian, gambaran masyarakat Pancasila dalam Si Unyil merupakan proyeksi ideal dari negara, bukan potret realitas sosial masa Orde Baru yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi dan represi politik. Penelitian ini membuktikan bahwa media massa, khususnya film anak-anak, memiliki peran strategis dalam pembentukan kesadaran ideologis generasi muda, dan Si Unyil menjadi bukti bagaimana rezim otoriter memanfaatkan budaya populer yang tampak apolitis untuk mencapai tujuan politik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada film-film anak-anak lain pada masa Orde Baru atau membandingkannya dengan tayangan anak-anak pada era Reformasi, serta mengkaji dampak jangka panjang dari paparan nilai-nilai ideologis melalui tayangan anak-anak terhadap pembentukan identitas generasi yang dibesarkan oleh tayangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Althusser, L. (1971). Ideology and ideological state apparatuses (Notes towards an investigation). Dalam *Lenin and philosophy and other essays* (terj. B. Brewster, hlm. 127-186). New York: Monthly Review Press.
- Anderson, B. (1990). *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Atmowiloto, A. (1986). *Telaah tentang televisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Bourchier, D. (2019). *Demokrasi illiberal di Indonesia: Ideologi negara keluarga* (terj. A. R. Zainuddin). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti sejarah* (terj. N. Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (ed. dan terj. Q. Hoare & G. N. Smith). New York: International Publishers.
- Kitley, P. (2000). *Television, nation, and culture in Indonesia*. Athens: Ohio University Press.
- Kitley, P. (2014). *Televisi, negara, dan budaya di Indonesia* (terj. N. S. Damayanti). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan kontrol: Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa, 1942-1945*. Jakarta: Yayasan Kobar.
- Robison, R. (1986). *Indonesia: The rise of capital*. Sydney: Allen & Unwin.
- Santrock, J. W. (2011). *Child development* (13th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Schwarz, A. (1994). *A nation in waiting: Indonesia in the 1990s*. Sydney: Allen & Unwin.
- Sen, K., & Hill, D. T. (2000). *Media, culture and politics in Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Sumber Artikel:

- Aurora, P. A. (2024). Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 4(1), 1-15.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media Verleden*, 1(1), 1-109.
- Humaidi, Z. (2010). Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan negara periode kebijakan asas tunggal. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 367-386.
- Lahur, R. (1981). Masalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4): Ditinjau dari segi masyarakat. *Analisis CSIS*, (11), 960-970.

Mujani, S. (1996). Politik Indonesia tahun 1990-an: Kebangkitan ideologi?. *Jurnal Ilmu Politik*, (2), 1-18.

Ningrum, T. W., & Trilaksana, A. (2014). Nilai-nilai pendidikan karakter dalam film "Si Unyil" tahun 1979-1992. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(2), 345-347.

Sumber Surat Kabar dan Majalah

Kompas. (1985, Maret 31). Si Unyil: Antara hiburan dan pendidikan. *Kompas*.

Tempo. (1981, Oktober 31). Si Unyil: Boneka yang jadi primadona. *Tempo*, hlm. 22-24.

Sumber Berita Daring

Alinea.id. (2023, Januari 11). 'Propaganda' yang membosankan film serial Si Unyil. *Alinea.id*. Diambil dari <https://www.alinea.id/gaya-hidup/propaganda-yang-membosankan-film-serial-si-unyil-b2hKj9JAm>